

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi

Pengertian Akuntansi

Menurut *Accounting Principle Board* (APB), Akuntansi adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan yang kemudian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut buku *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT), Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan sebagai alternative dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

Secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan (Hery, 2014: 6)

Dari beberapa definisi akuntansi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, definisi dari akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan atas transaksi dan kejadian perputaran

keuangan yang ada pada perusahaan tersebut guna memberikan informasi keuangan perusahaan dan pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.

2. Laporan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Hery (2014:19) laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja keuangan. Sedangkan menurut Wahyudiono (2014:10) laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak luar perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi guna sebagai data keuangan dan penghubung dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, karyawan, investor, dll.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Hery (2014:19), tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi

keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang isinya: “Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.”

c. Urutan Laporan Keuangan

Urutan laporan keuangan secara umum berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut:

1) Laporan Laba Rugi

Merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode tertentu. Laporan laba rugi ini akhirnya memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba/rugi bersih, yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban.

2) Laporan Ekuitas Pemilik

Adalah adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu (laporan perubahan modal). Ekuitas pemilik akan bertambah dengan adanya investasi (setoran modal) dan laba bersih, sebaliknya ekuitas pemilik akan berkurang dengan adanya prive

(penarikan/pengambilan untuk kepentingan pribadi) dan rugi bersih.

3) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca adalah menggambarkan posisi keuangan perusahaan.

4) Laporan Arus Kas

Adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi sampai pada aktivitas pendanaan atau pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan/penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap

mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

3. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Definisi dan Kriteria UMKM

Pada dasarnya UMKM memiliki berbagai definisi dan kriteria yang berbeda-beda. Di Indonesia terdapat beberapa pengertian mengenai UMKM diantaranya yaitu menurut :

- 1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang memiliki kriteria yaitu:
 - a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha menengah ini memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2) Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) yang memasukkan kuantitas tenaga kerja yang terlibat. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

3) Menurut Keputusan Menteri Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang memiliki penjualan/omset pertahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati), terdiri atas (1) badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi); dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang, dan jasa).

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Karakteristik UMKM di Indonesia adalah sebagian besar usaha UMKM merupakan kegiatan padat karya yang banyak memanfaatkan sumber daya lokal; selang waktu produksi yang relatif singkat atau produksi dapat dilakukan secara cepat.

2. Asas dan Tujuan UMKM

- 1) Berdasarkan perundang-undangan, UMKM dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan usahanya didasari oleh asas-asas sebagai berikut:
 - a) Asas kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
 - b) Asas demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
 - c) Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama

dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- d) Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
- e) Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh.
- f) Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- g) Asas kemandirian, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM.
- h) Asas keseimbangan kemajuan, adalah asas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

i) Asas kesatuan ekonomi nasional, adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

2) Tujuan

Usaha Kecil, Mikro dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

a. Ruang Lingkup

SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut. Untuk entitas yang tidak memenuhi kriteria dan definisi UMKM masih diperbolehkan menggunakan SAK EMKM jika otoritas mengizinkan entitas

tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

b. Penyajian Wajar Laporan Keuangan

Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan:

- 1) *Relevan*: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
- 2) *Keterbandingan*: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
- 3) *Keterpahaman*: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

c. Komponen Laporan Keuangan SAK EMKM

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kekayaan suatu perusahaan tersebut, modal dan hutang entitas pada akhir periode pelaporan.

Dalam SAK EMKM terdapat laporan posisi keuangan entitas yang mencakup pos-pos sebagai berikut:

a) *Aset*

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh suatu entitas. Manfaat ekonomik masa depan suatu aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap arus kas entitas. Arus kas tersebut dapat timbul dari penggunaan maupun pelepasan aset.

b) *Liabilitas*

Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik.

c) *Ekuitas*

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas.

2) Laporan Kinerja Usaha (Laba Rugi)

Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan. Definisi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a) Penghasilan

Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk dan kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal, yang dikenal dengan sebutan misalnya: penjualan, imbalan, bunga, deviden, royalti, dan sewa.

b) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar dan penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan kerugian. Beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang

normal misalnya: beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban namun tidak termasuk dalam kategori beban yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas normal, misalnya: kerugian dari pelepasan aset.

3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan keuangan berhubungan ke dalam informasi yang terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan memuat:

- a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM;
- b) Iktisar kebijakan akuntansi;
- c) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

d. Bentuk Laporan Keuangan SAK EMKM

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

ENTITAS LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8			
ASET	Catatan	20X8	20X7
Kas dan setara kas			
Kas	3	xxx	xxx
Giro	4	xxx	xxx
Deposito	5	xxx	xxx
<i>Jumlah kas dan setara kas</i>		xxx	xxx
Piutang usaha	6	xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar dimuka	7	xxx	xxx
Aset tetap		xxx	xxx
Akumulasi penyusutan		(xxx)	(xxx)
<i>JUMLAH ASET</i>		<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
LIABILITAS			
Utang usaha		xxx	xxx
Utang bank		xxx	xxx
<i>JUMLAH LIABILITAS</i>		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba (defisit)		xxx	xxx
<i>JUMLAH EKUITAS</i>		<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
<i>JUMLAH LIABILITAS&EKUITAS</i>		<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

Gambar 2.1 : Laporan Posisi Keuangan

Sumber : SAK-EMKM (2018)

LAPORAN LABA RUGI

Gambar 2.2 : Laporan Laba Rugi

ENTITAS LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X8			
PENDAPATAN	<u>Catatan</u>	<u>20X8</u>	<u>20X7</u>
Pendapatan usaha	10	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
<i>JUMLAH PENDAPATAN</i>		xxx	xxx
BEBAN			
Beban usaha		xxx	xxx
Beban lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH BEBAN			
LABA (RUGI) SEBELUM		xxx	xxx
PAJAK PENGHASILAN			
Beban pajak penghasilan	12	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
LABA (RUGI) SETELAH			
PAJAK PENGHASILAN		<u>xxx</u>	<u>xxx</u>

Sumber : SAK-EMKM (2018)

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 2.3 : Catatan Atas Laporan Keuangan

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20X8
<p>1. UMUM</p> <p>Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.</p> <p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</p> <p>a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>b. Dasar Penyusunan Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p> <p>c. Piutang Usaha Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p> <p>d. Persediaan Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan <i>overhead</i>. <i>Overhead</i> tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. <i>Overhead</i> variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan biaya persediaan rata-rata.</p> <p>e. Aset Tetap Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai</p>

residu.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. KAS

	20X8	20X7
Kas kecil Jakarta – Rupiah	xxx	xxx

4. GIRO

	20X8	20X7
PT Ban xxx – Rupiah	xxx	xxx

5. DEPOSITO

	20X8	20X7
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
Suku bunga – Rupiah	4,50%	5,00%

6. PIUTANG USAHA

	20X8	20X7
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	20X8	20X7
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan perizinan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

8. UTANG BANK

Pada tanggal 4 Maret 20X8, entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimal kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.

9. SALDO LABA

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.

10. PENDAPATAN PENJUALAN

	20X8	20X7
Penjualan	xxx	xxx
Retur penjualan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

11. BEBAN LAIN-LAIN

	20X8	20X7
Bunga pinjaman	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

	20X8	20X7
Pajak penghasilan	xxx	xxx

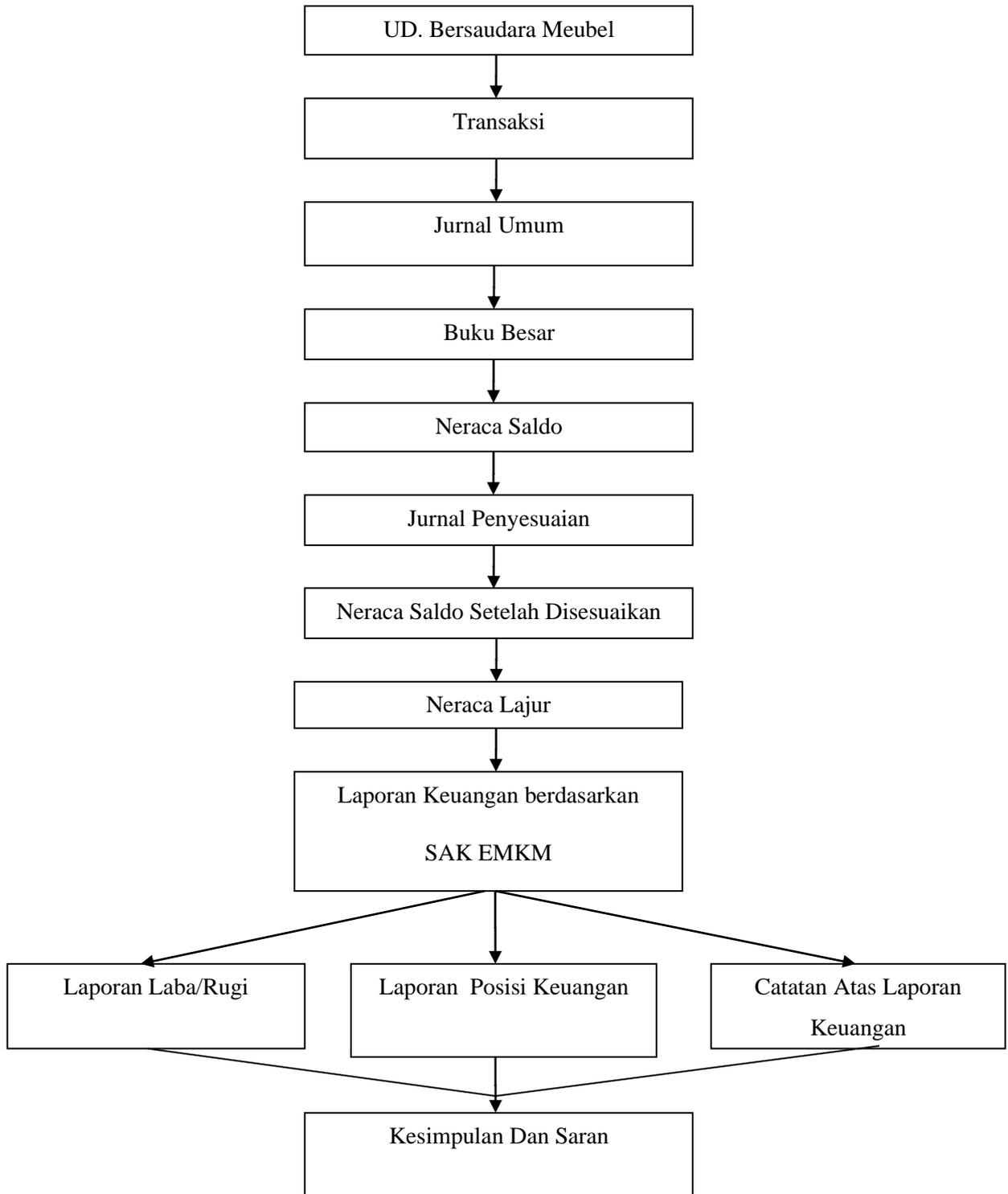
Sumber : SAK-EMKM (2018)

B. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Ni Komang Ismadewi, Nyoman Trisna Herawati, Anantawikrama Tuggal Atmaja Tahun 2017	Putu Febryna Utami Paramitha, Gede Adi Yuniarta, Nyoman Trisna Herawati Tahun 2017	Jilma Dewi Ayuningtyas Tahun 2017
Judul	Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan SAK EMKM	Penerapan Pencatatan Akuntansi Keuangan Pada Industri Kecil Rumahan Berdasarkan SAK EMKM	Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMM
Objek	Studi Kasus Pada Usaha Ternak Ayam <i>Boiler</i> I Wayan	Studi Kasus Pada Pembuatan Tas Kain Bali	Studi Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan
Metode	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Penelitian Deskriptif Kualitatif	Penelitian Deskriptif Kualitatif
Tujuan	Penelitian ini bertujuan untuk penyusunan laporan keuangan	Tujuan dari penelitian ini adalah penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM serta kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangannya	Penelitian ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan UMKM Bintang Malam berdasarkan SAK EMKM
Hasil	Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM	Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM	Penyusunan Laporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM
Persamaan	Variabel Penelitian	Variabel Penelitian	Variabel Penelitian
Perbedaan	Obyek Penelitian	Obyek Penelitian	Obyek Penelitian

(Sumber: Penulis 2019)

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.4: Kerangka konseptual penelitian

(Sumber: Penulis 2019)

Keterangan :

Dalam kerangka konseptual ini berawal dari mencari objek dan menemukan objek di UD. Bersaudara Meubel yang bertempat di Tambak Mayor Surabaya. UD. Bersaudara Meubel ini didirikan pada tahu 1998 dan mempunyai 4 orang pegawai.

Data catatan keuangan yang diperoleh peneliti pada UD. Bersaudara Meubel ini sangat sederhana berupa nota transaksi dari buku kas masuk dan kas keluar, membuat jurnal, posting ke buku besar, merekap dalam neraca saldo, menyusun neraca lajur, lalu mengolahnya menjadi neraca, laporan laba rugi selanjutnya membuat catatan atas laporan keuangan. sehingga peneliti berupaya untuk menyempurnakan catatan tersebut menjadi sebuah laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).